

PENANGANAN TANAH TUTUPAN JEPANG
2024, Ditarget Sudah Bersertipikat Hak Milik



KR-Istimewa

Lokasi bukit di Parangtritis yang terdapat tanahutupan Jepang.

BANTUL (KR) - Pemerintah DIY dan Pemkab Bantul hingga saat ini masih melakukan penanganan atau upaya penyelesaian tanahutupan Jepang di perbukitan wilayah Kalurahan Parangtritis Kretek Bantul yang sudah 79 tahun belum terselesaikan. Tanahutupan Jepang tersebut awalnya tercatat leter C sebanyak 256 persil, tapi sekarang sudah dikuasai oleh 920 orang, karena telah dibagi anak cucu pemilik waris.

Kepala BPN Bantul, Iskandar Subagya SH MH, Senin (11/7), mengungkapkan belum lama ini telah dilakukan sosialisasi dan cipta kondisi program gugus tugas reformasi Agraria Kabupaten Bantul de-

ngan narasumber Bupati Bantul dan Kepala Kantor Wilayah BPN DIY.

Terkait tanahutupan Jepang yang sudah 79 tahun belum ada penyelesaiannya sehingga ada komitmen dari Gubernur DIY menyetujui tanahutupan Jepang dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan Leter C yang tercatat di buku tanah kalurahan setempat.

Program yang diambil melalui konsolidasi tanah yang tahapannya ada sosialisasi dan cipta kondisi, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agar memahami bahwa tanahutupan Jepang itu suatu masalah yang cukup lama belum terselesaikan. Sehingga

masyarakat sepakat untuk menyelesaikan, seperti apa nanti akan diselesaikan lewat konsolidasi tanah.

Tahapan pertama sosialisasi dan cipta kondisi itu dilakukan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan penempatan tanah (IP4T). Sebelumnya Pemkab Bantul telah menyediakan patok batas tanah untuk dipasang. Setelah itu ada beberapa tahapan konsolidasi tanah hingga ada tanda-tangan peta desain konsolidasi tanah, kemudian ada pelepasan oleh pemilik tanah di depan Kepala Kantor Pertanahan Bantul.

"Setelah semua selesai baru diusulkan pengesahan oleh Kakanwil BPN DIY kemudian diterbitkan SK Penetapan hak sertifikasi konsolidasi tanah. Seluruh tahapan itu ditarget selesai 2024," jelasnya.

Sesuai dengan konsolidasi, nantinya sebagian tanah akan disumbangkan kepada negara untuk kepentingan umum, bisa 20 persen hingga 30 persen. Seperti untuk pembangunan jalan, gardu penganaman, tempat ibadah, balai desa atau apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sehingga akan ada pengukuran sesuai desain hasil musyawarah. **(Jdm)-d**

MTsN 6 Sleman Serahkan Hewan Kurban



KR-Istimewa

Harsoyo menyerahkan hewan kurban.

SLEMAN (KR) - Kepala MTsN 6 Sleman Harsoyo didampingi Wakil Kepala Bidang Humas Sutarjo menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat dan sekolah dasar yang ada di sekitar lingkungan MTsN

6 Sleman. "Pada tahun ini madrasah meyerahkan hewan kurban sebanyak 8 ekor kambing yang merupakan tabungan kurban siswa kelas 7 dan 8," kata **Harsoyo, Jumat (8/7).** Kegiatan menyalurkan

hewan kurban kepada masyarakat merupakan program tahunan. "Kami berharap dengan penyaluran hewan kurban kepada masyarakat dan lembaga pendidikan sekitar akan dapat mempererat kerja sama yang telah terjalin selama ini," harapnya.

Sementara Sukirman selaku Pengurus Masjid Sinduadi mewakili masyarakat Rogoyudan dan sekitarnya mengucapkan terima kasih atas perhatian MTsN 6 Sleman yang dalam setiap tahunnya senantiasa memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar khususnya dalam pemberian hewan qurban. **(Jay)-d**

SATU EKOR SAPI BERGEJALA RINGAN PMK

Ratusan Hewan Kurban Terkena Cacing Hati

SLEMAN (KR) - Selama dua hari penyembelihan hewan kurban, tercatat sebanyak 162 sapi terkena cacing hati atau 3,52 persen dari 4.556 sapi yang disembelih. Sementara untuk domba ditemukan 6 kasus cacing hati atau 0,13 persen dari total 4.820 ekor, dan untuk kambing relatif kecil, hanya 2 kasus atau 0,12 persen dari 832 ekor yang disembelih.

"Data tersebut baru masuk sampai hari Minggu (10/7) pukul 15.00 yang dipantau dari 1.105 lokasi titik pemotongan dengan jumlah ternak yang dipotong 10.216 ekor. Data belum final karena peman-tauan masih kami lakukan sampai dengan tanggal 12 Juli," ungkap Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono kepada wartawan di kantornya, Senin (11/7).

Menurutnya, selama pe-mantauan pihak DP3

Sleman menemukan ada satu ekor sapi bergejala ringan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sapi yang kena PMK tersebut untuk bagian kepala, kaki dan jeroan sudah diafkir. Sedangkan untuk daging masih aman dikonsumsi.

"DP3 Sleman juga memantau pasar tiban dan jumlah ternaknya. Untuk jumlah titik ada 353, tersebar di kandang kelompok 110 lokasi, pinggir jalan 10 lokasi, dan pedagang/perseorangan 233 lokasi. Sementara jum-



KR-Istimewa

Warga RW 21 Gatak Sidoluhur Godean tahun ini menyembelih 5 ekor sapi dan tidak ditemukan kasus cacing hati.

lah ternak yang terpantau sebanyak 6.431 ekor terdiri dari sapi 3.306 ekor, domba 2.942 ekor, dan kambing 183 ekor," bebernya.

Disinggung soal Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/suket dalam Kabupaten (lalu lintas ternak antar kapanewon

dalam kabupaten) yang diterbitkan oleh Puskeswan tercatat sebanyak 702 SKKH. SKKH tersebut untuk sapi 1.030 ekor, domba 426 ekor, kambing 19 ekor. Dengan demikian, total ternak yang dilalinkan dalam Kabupaten ada 1.475 ekor. **(Has)-d**

SOKSI BERIKAN HEWAN KURBAN

Kasus Cacing Hati Tinggi, Dapat Sorotan

BANTUL (KR) - Jumlah hewan kurban yang disembelih dalam momentum Hari Raya Idul Adha Tahun 2022 mencapai 18.837 ekor. Jumlah tersebut terbagi 6.585 ekor sapi, 4.299 ekor kambing serta 4.957 ekor domba. Sedang 368 ekor hewan kurban diketahui terjangkiti cacing hati, terdiri 134 ekor sapi, 26 ekor kambing dan 28 ekor domba.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (DKPP) Bantul, Joko Waluyo SPt MSi, mengatakan jumlah hewan kur-

ban yang dipotong di Hari Idul Adha 2022 lebih banyak dibandingkan tahun lalu lalu. Petugas pemantau DKPP Bantul di lapangan juga menemukan cacing hati lebih banyak. "Tahun 2021 lalu jumlah ternak yang disembelih mencapai 18.436 ekor. Sedangkan tahun 2022, hewan kurban yang dipotong mencapai 18.837 ekor," ujarnya.

Menurutnya, DKPP justru meny-oroiti kasus temuan cacing hati pada hewan kurban yang meningkat. Sebagai perbandingan, tahun 2021

terdapt 141 kasus cacing hati. Sekarang ini angkanya melonjak mencapai 368 kasus. Dari kasus temuan itu, didominasi cacing hati ditemukan pada sapi.

Sementara Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menyerahkan sapi kurban di Dusun Soko Seloharjo Pundong Bantul, Senin (11/7). Ketua DPD 11 Soksi DIY, H Suwardi, mengatakan dari Depinas Soksi menyerahkan sapi ke warga Soko. **(Roy)-d**

HUT ke-33, Museum Monjali Luncurkan Buku

SLEMAN (KR) - Puncak HUT ke-33 Museum Monumen Jogja Kembali (Monjali) dilakukan peluncuran Buku 'Berpaling Kepada Sistem Among, Bunga Rampai Ketamansiswaan, Permuseuman dan Kemasyarakatan' di Gedung Serbaguna Monjali, Ngaglik Sleman. Buku setebal 308 halaman ini merupakan himpunan tentang permuseuman yang di antaranya dimuat di *SKH Kedaulatan Rakyat* sejak 2007-2022.

Ketua Umum Asosiasi

Museum Barahmus DIY Ki Bambang Widodo kepada *KR*, Senin (11/7) menyebutkan, dalam acara yang

dihelat Rabu (6/7) buku tersebut juga diserahkan pada Pemimpin Redaksi *SKH Kedaulatan Rakyat*



KR-Istimewa

Foto bersama usai peluncuran buku.

Drs Octo Lampito MPd dan 6 tokoh permuseuman DIY, serta penyerahan simbolis. Puncak acaraa ditandai pemotongan tumpeng oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Sleman Arif Marwoto SH MAP diserahkan kepada Kepala Museum Monjali Kolonel (Purn) Maryono.SSos. Selain itu juga dilakukan penyerahan simbolis bantuan 500 exp buku 'Pancadasa Warsa Kencana Barahmus' oleh Kepala Seksi Permuseuman Dinas Kebudayaan DIY Wismarini SE M.Hum. **(Vin)-d**



DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

RAPERDA PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
Mendorong Masyarakat untuk Lebih Inovatif



KR-Istimewa

Y Gustan Ganda

SLEMAN (KR) nPanitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sleman telah selesai membahas rancangan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan inovasi daerah Kabupaten Sleman. Raperda itu untuk mendorong masyarakat agar lebih inovatif dalam mengembangkan potensi di Kabupaten Sleman.

Ketua Pansus Penyelenggara Inovasi Daerah Y Gustan Ganda ST mengatakan, setelah secara maraton melakukan pembahasan, akhirnya raperda itu telah selesai. Raperda ini untuk lebih menguatkan legitimasi daerah tentang inovasi daerah.

"Raperda ini untuk memperkuat Perbup No. 30 Tahun 2021 tentang inovasi daerah. Dan sekarang sudah disetujui untuk dijadikan perda," kata Ganda, Senin (11/7).

Dijelaskan, raperda ini bertujuan untuk mendorong instansi pemerintahan daerah, akademisi dan masyarakat lebih inovatif. Selain itu juga untuk memberikan reward kepada masyarakat telah melakukan inovasi.

"Dengan raperda ini untuk mendorong masyarakat, instansi pemerintah terus berinovasi dan berkelanjutan. Selain itu juga untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat mempunyai inovasi. Sehingga nanti akan terus bermunculan inovasi demi kemajuan Sleman," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Ganda, dalam raperda ini juga mengakomodir penjangkaran inovasi dari masyarakat. Dimana masyarakat bisa mengajukan proposal untuk pengembangan inovasi. Kemudian nanti akan diverifikasi oleh tim independen.

"Penjangkaran inovasi itu untuk mengakomodir masyarakat yang mengembangkan inovasi. Tapi inovasi itu harus yang memiliki guna dan manfaat untuk mengembangkan potensi di Sleman," terangnya.

Selanjutnya masyarakat yang proposalnya disetujui, nanti akan difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan inovasi yang dikembangkan dan difasilitasi secara mandiri dapat dikomersialisasikan dengan perjanjian antara inovator dan pihak pihak pengguna inovasi.

"Ketika difasilitasi oleh APBD, otomatis akan menjadi milik pemerintah daerah. Tapi difasilitasi secara mandiri, inovasi itu akan jadi hak sepenuhnya inovator," terangnya. **(Sni)-d**



KR-Istimewa

Pansus saat rapat kerja dengan mitra kerja.

PANSUS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
Tumbuhkan dan Kembangkan Koperasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan

SLEMAN (KR) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sleman telah selesai membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Keberadaan raperda tersebut untuk meningkatkan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi yang tangguh dan mandiri basis pengembangan ekonomi kerakyatan.

Ketua Pansus perlindungan dan pemberdayaan koperasi Ngadiman SAg MSI mengatakan, di Kabupaten Sleman ini ada sekitar 400 koperasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 koperasi yang masih eksis, sedangkan 100 koperasi emati suri atau lesu.

"Tentunya ini menjadi PR bagi pemerintah daerah agar semua koperasi di Kabupaten Sleman tetap eksis atau sehat. Makanya dengan adanya raperda ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi," kata Ngadiman, Senin (11/7).

Tujuan dari raperda ini menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi yang tangguh dan mandiri dengan basis pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain itu untuk meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan daerah.

"Ketika koperasi ini berjalan dengan baik, bisa menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi. Kemudian keberadaan koperasi ini juga diharapkan

bisa mengangkat potensi daerah," ujar politisi dari PPP ini.

Dengan raperda ini, pemerintah memberikan perlindungan terhadap koperasi. Bentuk perlindungan itu meliputi kegiatan preventif yaitu mencegah terjadinya penyimpangan, kuratif adalah upaya menyehatkan koperasi dan promotif yaitu upaya memajukan usaha koperasi.

"Agar koperasi berjalan sehat dan berkembang, tentunya pemerintah harus melakukan, pelatihan dan penguatan modal. Selain itu, juga perlu adanya pemberian penghargaan bagi koperasi yang berprestasi," tuturnya.

Dalam raperda itu, juga ada peran serta masyarakat. Dimana masyarakat dapat memberikan saran dan masukan pada perangkat daerah untuk perlindungan dan pemberdayaan koperasi.

"Peran serta masyarakat itu cukup



KR-Saifullah Nur Ichwan

Ngadiman SAg MSI

penting dalam perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Salah satunya bisa memberikan informasi apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan koperasi," pungkasnya. **(Sni)-d**



KR-Istimewa

Pansus saat studi banding ke Disperindagkop Madiun.